

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa Orde Baru pemerintahan dipegang oleh Soeharto, yang menerapkan Pancasila dan UUD 1994 secara murni dan konsekuen. Orde Baru didirikan untuk mengoreksi total pemerintahan Soekarno. Pada masa Orde Baru berlaku asas tunggal yaitu hanya ideologi Pancasila yang boleh berkembang sedangkan ideologi lain tidak boleh berkembang karena di khawatirkan mengganggu stabilitas Negara seperti pada pemerintahan sebelumnya.

Soeharto merupakan orang yang sangat berperan penting dalam mempertahankan berdirinya pemerintahan Orde Baru. Untuk membuat Orde Baru terus berdiri Soeharto terus menarik simpati rakyat dengan berbagai cara seperti dengan media yaitu media pembangunan. Melalui media Soeharto terus menutupi kejahatan Orde Baru dan memberitakan kebaikan serta pembangunan ekonomi Orde Baru saja.

Dalam memimpin pemerintahan Soeharto mencari orang yang bisa diajak bekerja sama untuk mempertahankan kekuasaannya. Salah satu yang dilakukan oleh Soeharto adalah menciptakan tiga kekuatan yaitu ABRI, Birokrasi dan Golkar. Dan dalam perkembangannya Soeharto bertemu dengan Harmoko dan mempercayai Harmoko menjadi Menteri Penerangan bahkan sampai tiga periode, menjadi Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR/MPR.

Harmoko merupakan salah satu orang yang berperan penting pada masa Orde Baru karena turut serta dalam memberikan pemikiran dan menentukan kebijakan politik pada saat itu. Untuk mengetahui peran Harmoko pada masa Orde Baru penulis akan mengkaji melalui analisis biografi sehingga dapat terlihat bagaimana Harmoko mampu menjadi orang yang berperan penting dalam perpolitikan Indonesia pada masa Orde Baru. Melalui analisis biografi yang membedah perjalanan hidup Harmoko, penulis akan memaparkan perjalanan hidup Harmoko karena dengan melihat perkembangan yang terjadi pada diri Harmoko dapat terlihat bagaimana Harmoko bisa menjadi orang penting pada masa Orde Baru. Perkembangan hidup Harmoko dipengaruhi oleh dirinya sendiri baik melalui

minat maupun bakat yang dimilikinya, dari keluarga, maupun dari lingkungan yang mampu membentuk Harmoko menjadi pribadi yang utuh.

Harmoko (2009, hal. 5) menulis pengalaman hidupnya tentang bagaimana keadaan keluarganya yang mempengaruhi minat dan bakat yang muncul dalam diri Harmoko. Minat Harmoko terhadap dunia jurnalis dipengaruhi oleh ayah Harmoko yaitu Asmoprawiro yang sering membelikan buku bacaan untuk Harmoko. Ayah Harmoko merupakan orang yang gemar membaca untuk ukuran warga yang tinggal di desa, salah satu bacaan yang sering ayah Harmoko baca adalah Koran Surabaya. Harmoko sewaktu kecil sering mencuri bacaan dari koran dan media massa lain yang dibaca ayahnya, maka minat Harmoko terhadap jurnalistik mulai muncul yaitu saat ia kelas 3 SR bercita-cita menjadi seorang wartawan.

Harmoko memulai karirnya dalam dunia jurnalistik sebagai kolektor koran, kemudian menjadi seorang wartawan yang pada awal kariernya bekerja di Surat Kabar Merdeka. Melalui profesi inilah Harmoko memandang dunia sekitarnya secara luas seperti mengenai pluralitas masyarakat, dinamika sosial politik, dan hal lainnya. Fachry Ali & Novianto (1997, hal. 226) memaparkan bahwa Harmoko sejak muda sudah tertarik pada persoalan dan karya yang *cetho welo-welo*. Cetho welo-welo adalah bahasa Jawa yang artinya adalah jelas, nyata, terlihat mata, tersentuh tangan, dan bisa dirasakan.

Harmoko memulai karirnya dari mejadi kolektor koran, wartawan, penanggung jawab pemimpin redaksi, hingga pemilik surat kabar. Harmoko mulai diperhitungkan dalam dunia jurnalis saat Harmoko memiliki surat kabar Pos Kota yang memiliki oplah terbesar saat itu. Karir Harmoko terus berkembang hingga Harmoko menjadi Ketua PWI Pusat. Saat menjadi Ketua PWI Harmoko bertemu dengan Soeharto dan diminta untuk menjabat sebagai pemimpin Departemen Penerangan.

Hasil sosialisasi dalam dunia politik itu tidak sia-sia dalam tempo singkat karier politik Harmoko melesat. Setelah lima tahun menjadi pengurus DPP Golkar, dan anggota DPR, Harmoko mendapat kepercayaan besar dari Presiden untuk menjadi Menteri Penerangan. Dan beberapa hari setelah penunjukan Harmoko tersebut, ia dilantik secara resmi dan di siarkan di TVRI. Harmoko dilantik

menjadi Menteri Penerangan tanggal 23 Maret 1983, ia berkewajiban melaksanakan Ketetapan MPR No.II/MPR/1983 yaitu Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pola pembangunan.

“... Bagi Harmoko, beruntunglah ia dalam melaksanakan tugas selaku Menteri Penerangan, karena di bekali pengalaman sebagai anggota DPR dan MPR, sebelum menjadi Menteri. Dan ia pun terus menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara itu, khususnya yang ditetapkan oleh sidang MPR 1983 itu cukup membuat Harmoko merasa ‘in’ memimpin Departemen Penerangan. Di MPR Harmoko dipilih oleh Golkar sebagai Ketua Dept Penerangan dan Mass Media Golkar” (Busye M & Rujito, 1989, hal. 236).

Harmoko sebelum menjadi Menteri Penerangan memang telah terlebih dahulu masuk dalam dunia pers dan juga politik. Harmoko memandang bahwa pers bisa dijadikan sebagai alat untuk mengatur stabilitas Negara. Karena dengan mengontrol pers akan meminimalisir konflik politik sehingga mudah mengatur arah politik yang ingin diciptakan pada saat itu.

Salah satu cara untuk mengontrol media adalah diberlakukannya sistem atau persyaratan agar sebuah media bisa memiliki izin yang pada masa awal Orde Baru bernama SIT (Surat Izin Terbit), namun pada saat Harmoko menjabat sebagai Menteri Penerangan ia bernama SIUPP (Surat izin penerbitan). Dalam hal ini SIUPP sangat menentukan apakah pers bisa berdiri atau harus gulung tikar.

“Pada tanggal 31 Oktober 1984 Menteri Penerangan Harmoko mengeluarkan peraturan. Peraturan Menteri Penerangan Republik Indonesia No.1/PER/MENPEN/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Peraturan Menteri Penerangan ini banyak menimbulkan masalah di bidang penerbitan pers. Semula diduga dengan dicabutnya Surat Izin Terbit (SIT) dan diganti dengan SIUPP akan mempermudah mereka yang ingin mendirikan perusahaan atau penerbitan pers, namun dalam kenyataannya tidak banyak mengalami perubahan, bahkan justru makin mempersulit” (Abdullah, 2003, hal. 411).

SIUPP merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Penerangan Harmoko yang menuai Pro dan Kontra karena jika ada pers yang dianggap oleh pemerintah melanggar kode etik maka akan langsung di cabut SIUPP nya dan pers tersebut hanya bisa pasrah karena tidak bisa melakukan pembelaan diperadilan. Seperti pembredelan Sinar Harapan karena memberitakan bisnis keluarga Cendana. Kemudian pembredelan Tempo, Editor, dan Detik yang menyebabkan dukungan dari berbagai pihak salah satu dukungannya dengan membentuk Aliansi Jurnalis

Independen (AJI). Namun para aktivis AJI pun ditahan karena tidak memiliki SIUPP dalam penerbitan media cetak dan AJI pun dilarang terbit.

Harmoko dalam memimpin Departemen Penerangan mempunyai cara untuk berkomunikasi dengan rakyat yang dilakukan Harmoko adalah komunikasi dua arah yang dilakukannya langsung dengan rakyat Indonesia. Harmoko menyebutnya dengan komunikasi sambung rasa. Komunikasi ini dijalankannya seperti saat melakukan Safari Ramadhan yang membuatnya bertemu langsung dengan rakyat dan menanggapi tuntutananya.

“Dia mengakui, di Jawa Tengahlah dia mendapat inspirasi untuk mengembangkan inspirasi ‘sambung rasa’ yang kemudian sangat populer. Salah satu ekpresinya adalah bentuk-bentuk dialog antara para pemimpin atau para pejabat pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, komunikasi itu tidak hanya terjadi dialog, tapi juga ada perasaan terlibat. Jadi, keputusan yang akhirnya diambil tidak lagi karena perintah ataupun komando tapi sudah bentuk partisipasi. Masyarakat ikut memiliki keputusan itu” (Busye, 1997, hal. 254-255).

Program selanjutnya yang dilakukan Harmoko saat menjadi Menteri Penerangan adalah program Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa). Salah satu cara Harmoko dalam menyebarkan informasi adalah melalui radio yang didengarkan oleh masyarakat desa yang merupakan pendorong masyarakat desa untuk kumpul saat mendengarkan radio yang berupa hiburan-hiburan atau informasi yang disebarkan. Melalui radio inilah informasi-informasi dipancarkan dan menuai pembicaraan antar masyarakat desa yang memunculkan kepekaan sosial dan partisipasi sosial dalam pembangunan yang berusaha menaikkan taraf hidup masyarakat berdasarkan kehendaknya sendiri.

Harmoko terus menjejali masyarakat desa dengan informasi yang tidak hanya di dapat dari radio melainkan dari televisi dan juga koran. Televisi tersebut disebarkan ke kelurahan maupun kecamatan untuk ditonton para pemirsa bersama-sama. Selain radio dan televisi media lain yang digunakan oleh Harmoko untuk memudahkan rakyat mendapat informasi adalah melalui media massa yaitu dengan mengadakan program Koran Masuk Desa yang berusaha menciptakan masyarakat yang semakin kritis dan mencoba mencerdaskan rakyat yang buta huruf. Komunikasi sambung rasa itu juga ditujukan dengan kegiatan Safari Ramadhan

yang merupakan kegiatan silaturahmi menurut Harmoko. Selain kelompecapir Harmoko juga melakukan program menyebarkan informasi ke pesantren-pesantren.

“...Safari Ramadhan yang merupakan pemanfaatan kegiatan-kegiatan selama Ramadhan untuk komunikasi sambung rasa mendengarkan suara hati rakyat yang kemudian dibawa pada rapat kabinet sehingga persoalan bisa didengar langsung dan seperti Temu Kader tujuannya agar Golkar lebih responsif” (Azwar, 2009, hal. 88).

Safari Ramadhan dilakukan oleh Harmoko sebagai upaya mendekati masyarakat dan membaca situasi atau keadaan sekitar masyarakat dan mencoba membantunya. Setelah melakukan Safari Ramadhan kegiatan pemerintah selanjutnya adalah Impres Desa Tertinggal (IDT) yang bertujuan mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat lewat bimbingan pemerintah berupa pemberian dana. Setelah pemerintah melakukan evaluasi yang terlihat hasilnya banyak masyarakat miskin yang tidak berhak lagi memperoleh dana IDT karena sudah tergolong pengusaha kecil yang harus mengembangkan modalnya lewat bank. Namun dalam meminjam dana bank diperlukan anggunan sedangkan masyarakat yang baru mengembangkan usaha kecilnya tentu tidak memiliki apa yang bisa di jaminkan. Sehingga dalam hal ini Harmoko turun tangan membantu mereka dan berkomunikasi dengan pihak bank untuk memudahkan pinjaman dana untuk mereka.

Pada masa Orde Baru, Harmoko tidak hanya tampil sebagai Menteri Penerangan tapi ia juga tampil sebagai politikus. Pada masa Orde Baru terjadi penyederhanaan partai yang dibentuk hanya menjadi dua partai politik yaitu PPP dan PDI serta satu Golongan Karya/ Golkar. Hal ini dilakukan agar massa dapat memilih secara realistis, tanpa sikap fanatik dan sikap emosional yang terbentuk melalui ikatan agama, kesukuan, dan wilayah. Asas tunggal Pancasila diberlakukan karena kekhawatiran terjadinya konflik karena ikatan-ikatan primordial.

Pada saat Orde Baru segala kehidupan diatur oleh Asas Tunggal termasuk politik. Politik dibatasi untuk memiliki satu ideologi yaitu Pancasila. Ideologi yang berkembang selain Pancasila dilarang karena dikhawatirkan menimbulkan konflik dan menyebabkan stabilitas negara terancam. Maka diatur penyederhanaan partai agar tidak ada partai yang memiliki ideologi lain selain Pancasila.

“Keberlangsungan proses politik yang didasarkan pada tujuan ideologi pembangunan azas tunggal, selanjutnya mendapatkan pengawalan ekstra ketat dari kelompok militer sehingga peranan militer saat itu sangat besar dan dominan dalam menentukan proses perjalanan bangsa. Akhirnya konsep dwifungsi ABRI, pada saat itu mendapat pemaknaan yang sangat berarti karena didasari oleh koreksi dan fenomena sejarah yang digambarkan sangat mengerikan. Kondisi ini kemudian melahirkan apa yang disebut dengan sentralistme kekuasaan yang *legitimate*, dengan dasar perkembangannya akibat sosialisasi visi yang menyatakan bahwa proses pembangunan membutuhkan stabilitas politik nasional yang kuat dan handal” (Gumelar,dkk, 2000, hal. 200-201).

Dengan adanya asas tunggal tersebut memunculkan Golkar sebagai partai kuat dan sering disebut dengan partai pemerintah. Golkar berdasarkan historisnya di bangun dan dibesarkan oleh ABRI. Golkar memiliki langkah yang luas karena memiliki dukungan yang solid dari ABRI, Birokrasi dan kalangan teknokrat. kekuatan Golkar juga bisa dilihat karena dibawah kepemimpinan Soeharto sebagai Dewan Pembina yang sangat menentukan arah Politik Golkar. Golkar memiliki ideologi modernisasi dan non konsolidasi politik. Golkar menjadi mesin politik untuk mengamankan, memperlancar, dan memenangkan agenda politik dan program pembangunan Orde Baru.

Dalam perkembangnya Golkar terus berganti pimpinan yang selalu dijabat oleh ABRI. Namun hal yang menarik terlihat saat terpilihnya salah satu tokoh sipil sebagai ketua Umum Golkar yaitu Harmoko tahun 1993-1999.

“Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, pimpinan Golkar selalu berada di tangan para jenderal (ABRI). Dipilihnya Bung Harmoko, dilatarbelakangi dengan mempertimbangkan kinerja DPP Golkar sebelumnya, maka Dewan Pembina dalam laporannya di Forum Munas V, menegaskan membimbing langkah-langkah yang harus ditempuh oleh DPP Golkar dimasa depan, dengan memberikan kerangka baik kemungkinan munculnya tokoh sipil. Dewan Pembina akhirnya, secara terang-terangan telah mempunyai ketetapan berkeinginan dengan menjadikan Bung Harmoko memimpin Golkar” (Syam, 2008, hal. 27).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Soeharto sebagai Dewan Pembina Golkar sangat menentukan arah politik Golkar termasuk dalam menentukan siapa yang berhak memimpin Golkar. Seiring dengan berkembangnya Golkar yang selalu dijabat oleh ABRI mulai muncul tuntutan bahwa Golkar harus kembali ke bawah. Pimpinan Golkar harus yang bisa mewakili rakyat. Hal tersebut ditanggapi

Golkar dengan menguatkan tokoh sipil di dalam tubuh Golkar dengan dipilihnya Harmoko.

Dalam tubuh Golkar sebenarnya memang sudah mulai terlihat menguatnya sipil. Hal itu terlihat saat era Sudarmono. Peran sipil pun semakin menguat dengan dipimpinnya Golkar oleh Harmoko. Perkembangan selanjutnya menunjukkan betapa situasi politik dalam sistem politik hegemoni berlaku tidak adil bagi partai-partai non-Golkar. Hal itu ditunjukkan dari posisi rangkap jabatan antara posisi Harmoko sebagai Menteri Penerangan dan sebagai ketua Umum Golkar.

“Harmoko adalah tokoh sipil pertama yang dilantik sebagai Ketua Umum Golkar, akan tetapi masyarakat tidak terkejut jika seorang tokoh sipil diangkat ke jabatan-jabatan penting yang dulu selalu diisi oleh tokoh militer. Semakin banyak gubernur dan duta besar, misalnya, berasal dari kalangan sipil. Jadi pergantian-pergantian pemimpin yang berlatar belakang militer dengan pemimpin sipil sudah menjadi perkara biasa” (Noor,dkk, 1996, hal. 93).

Munas V Golkar pada bulan oktober 1993 memberi mandat kepada pimpinan Golkar untuk turun ke bawah ke daerah-daerah Tingkat II di seluruh Indonesia. Mandat dan amanat tersebut segera dilaksanakan oleh Ketua Umum DPP Golkar Harmoko dengan metode pendidikan politik melalui komunikasi politik yaitu temu kader. Temu kader merupakan upaya untuk menjadikan Golkar lebih responsif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat dan untuk meningkatkan kembali perolehan suara Golkar pada pemilu 1997.

“Harmoko sendiri, dalam wawancara dengan Kompas menjelaskan bahwa Temu Kader adalah wahana untuk mengembangkan komunikasi dan pendidikan politik serta menyampaikan gagasan dan program-programnya yang mengacu pada amanat Munas V Golkar. Karena itu, dalam setiap Temu Kader, Harmoko mengaku selalu bicara soal program” (Azwar, 2009, hal. 86).

Temu kader yang dilakukan Harmoko merupakan upaya konsolidasi multidimensi, untuk meningkatkan kinerja Golkar agar mampu menjawab tantangan zaman, mampu menampung, menyalurkan dan mewujudkan aspirasi masyarakat. Pemikiran Harmoko yang disampaikan dalam Temu Kader mencakup pemikiran dalam segala bidang kehidupan mulai dari masalah agama, politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Moringgo Busye (1997, hal. 87)

memaparkan Harmoko mendatangi 27 propinsi dan 305 kabupaten diseluruh pelosok tanah air, untuk mendekatkan Golkar dengan rakyat.

Dalam melakukan temu kader Harmoko melakukan komunikasi yang akrab dengan para kader sebutan Bung dan Mbak pun selalu diucapkan oleh Harmoko supaya tidak ada pembatas antara kader dari kalangan atas dan bawah. Hal itu dilakukan agar para kader yang berada di pedesaan maupun dari kalangan bawah merasa percaya diri dalam melakukan dialog dan merasa akrab dengan kader yang lainnya walaupun berbeda status sosialnya. Karena menurut Harmoko status sosial tidak menjadi masalah untuk menjadi seorang kader Golkar yang terpenting para kader memenuhi PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela).

Dalam agenda Temu Kader yang dilakukan Harmoko tersebut selalu menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat. Seperti memperbaiki keluhan pembangunan. Selain itu Harmoko juga akrab melakukan komunikasi dengan kaum muda. Harmoko mewawancarai para kaum muda dan menghadiahi mereka dengan jaket kuningnya beserta buku Golkar.

Harmoko dekat dengan semua golongan dari mulai kaum muda, para ulama, hingga para pekerja atau guru. Harmoko dekat dengan tokoh agama karena dianggap mampu menjaga stabilitas Negara. Selain itu nasib para buruh atau pekerja juga diperhatikan Harmoko hal itu dibuktikan dengan kepedulian Harmoko terhadap gaji mereka apa sudah sesuai UMR.

Temu kader ternyata banyak menuai pro-kontra dengan adanya tudingan bahwa temu kader merupakan kampanye terselebung karena secara tidak langsung dalam temu kader Harmoko memperkenalkan visi-misi atau keinginan politiknya. Namun Harmoko menjawab bahwa temu kader bukan kampanye terselubung karena bersifat terbuka dan untuk melaksanakan amanat Munas V.

Menurut Lopez Ansel da (1997, hal. 58) Harmoko dengan mudah menjawab tudingan yang menyebutkan temu kader merupakan kampanye. Menurut Harmoko temu kader yang dilakukan bukan kampanye, karena kampanye baru akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan Panitia Pemilihan Indonesia. Ia ke daerah-daerah adalah untuk melaksanakan amanat Munas V dimana DPP Golkar diharuskan melakukan Tri Sukses Golkar yaitu : Sukses konsolidasi,

Sukses Pembangunan Lima Tahun Keenam (Pelita VI), dan Sukses Pemilihan Umum 1997 dan Sidang Umum MPR 1998.

Selain itu Harmoko juga melakukan studi pemilih dalam survey dan kajian masalah aktual saat itu. Hal ini juga untuk membuat Golkar lebih responsif dan mengetahui bagaimana sebenarnya respon masyarakat kepada Golkar, apakah masih mendukung atau tidak. Disini Golkar juga menelaah kekurangan dan kelebihan lawan politiknya untuk dijadikan bahan pelajaran. Golkar sadar betul masyarakat sudah mulai analisis dan kritis menyikapi perkembangan yang ada oleh karena itu Golkar melakukan survey untukantisipasi hasil suara yang mereka dapatkan pada pemilu 1997. Setelah sukses menjadi Menteri Penerangan dan Ketua Umum Golkar Harmoko terus bersinar dengan menduduki jabatan baru menjadi seorang Ketua DPR/MPR RI.

“Kamis, 2 Oktober 1997 Gedung DPR/ MPR riuh tepuh tangan karena secara aklamasi Bung Harmoko telah terpilih sebagai Ketua DPR/ MPR, sedangkan wakil-wakilnya adalah orang-orang yang sudah lama digunjingkan yaitu Letjen TNI Syarwan Hamid (F-ABRI), Dr. Abdul Gafur (FKP) H. Ismail Hasan Metareum, SH (FPP), Hj. Fatimah Achmad, SH (F-PDI) dan sebagai Wakil Ketua MPR ditambah Poedjono Pranyoto (FUD)” (Harmoko, 1998, hal. 205).

Pada akhir masa Orde Baru, tahun 1998 bangsa Indonesia dihadapkan pada krisis multidimensional. Seperti masalah kemiskinan, inflasi tinggi, harga-harga melonjak, sektor usaha mengalami kemunduran yang sangat drastis, dan PHK meningkat. Dengan adanya krisis tersebut membuat kekhawatiran dimasyarakat yang memunculkan aksi unjuk rasa yang dimotori oleh mahasiswa. Mahasiswa yang berunjuk rasa menuntut reformasi, pemerintah menurunkan harga dan menglengserkan presiden Soeharto. Tuntutan reformasi juga banyak dikumandangkan oleh berbagai pihak termasuk Golkar yang merupakan binaan dari presiden Soeharto.

“... DPP Golkar menyikapi, tuntutan reformasi yang digalakkan harus terus dilakukan di semua bidang, baik di bidang politik, ekonomi, maupun bidang hukum dan *reshuffle* kabinet merupakan hak prerogratif presiden. Selain merekomendasikan reformasi menyeluruh, menurut Gafur, hasil rapat Golkar itu menunjuk Ketua FKP Irsyad Sudiro menyampaikan rekomendasi atau sikap Golkar itu dalam rapat pimpinan fraksi-fraksi yang akan dilakukan pada 19 Mei 1998” (Makka, 2008, hal. 18).

Tuntutan reformasi terus mengalir dari berbagai kelompok termasuk kelompok yang dahulu pernah menjabat di pemerintah Orde Baru seperti para ekonom *mafia barkeley* yang merupakan arsitek kebijakan ekonomi Orde Baru yang juga menghendaki Soeharto turun. Selain para ekonom militer dan organisasi-organisasi seperti KNIP, ICMI, organisasi pemuda dan Kosgoro juga menghendaki Soeharto turun. Selain itu Amien Rais dan Megawati juga mendukung reformasi. Disini pihak militer berusaha untuk tidak terlalu mendukung presiden karena tidak ingin ada bentrokan yang lebih besar antara mahasiswa dan pihak berwajib. Tuntutan dan tekanan terus dilakukan terutama oleh mahasiswa untuk reformasi. Tekanan tersebut adalah tuntutan reformasi total, pengunduran diri presiden, dan pelaksanaan sidang istimewa MPR. Dibawah tekanan yang semakin kuat, Ketua MPR/DPR didampingi Wakil Ketua dan seluruh fraksi diparlemen meminta agar presiden Soeharto bersedia mengundurkan diri. Dalam hal ini rakyat meminta kepada DPR/MPR untuk melakukan sidang khusus. Harmoko sebagai ketua DPR RI memberi keterangan dalam jumpa pers meminta agar Soeharto mundur.

Harmoko yang merupakan Ketua Umum Golkar pada saat itu dan merupakan Ketua MPR/DPR menyatakan persetujuan terhadap adanya reformasi dan lengsernya Presiden. Hal ini sungguh sangat menarik karena Harmoko merupakan orang yang dekat dan selama ini mendukung Presiden. Namun Harmoko seolah tidak mendukung lagi Presiden Soeharto dengan menyetujui tuntutan reformasi dan meminta Presiden untuk lengser dengan alasan untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. Harmoko sebagai ketua MPR/DPR berusaha menyalurkan aspirasi masyarakat dengan meminta presiden mengundurkan diri.

Ketertarikan penulis mengambil "*Kiprah Politik Harmoko pada masa Orde Baru melalui Analisis Biografi (1983-1999)*" karena Harmoko merupakan tokoh yang banyak menentukan arah politik Indonesia pada masa Orde Baru melalui kebijakan-kebijakannya yang banyak menuai pro dan kontra. Serta kiprah dan perannya di perpolitikkan Indonesia yang terbilang bertahan lama yaitu dari tahun 1983-1999. Dan karir politik Harmoko di Indonesia yang berkembang cukup pesat yaitu menjadi Menteri Penerangan selama tiga periode, Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR/MPR Republik Indonesia.

Berbagai tulisan mengenai tokoh politik Orde Baru sudah banyak yang menulis, namun disini penulis ingin mengangkat tokoh yang berperan dalam perpolitikan Orde Baru yaitu Harmoko. Memang tulisan mengenai Harmoko sudah banyak yang menulis seperti mengenai biografinya. Namun penulis tertarik untuk menganalisis biografi-biografi yang sudah ada tersebut untuk mendapatkan data yang lebih objektif karena penulis sulit menemukan tulisan ilmiah baik itu skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal mengenai Harmoko.

Kurangnya tulisan ilmiah mengenai Harmoko membuat penulis tertarik untuk mengetahui kiprah politik Harmoko melalui analisis biografi. Karena seperti biografi-biografi yang telah penulis temukan mengandung subjektivitas yang tinggi yang membagus-baguskan Harmoko. Melalui analisis biografi ini penulis akan membandingkan biografi-biografi yang penulis temukan dengan sumber lainnya.

Peranan Harmoko dalam perpolitikan Indonesia pada masa Orde Baru sangat penting karena posisi yang dijabatnya memungkinkan Harmoko memberikan pemikiran politik dan memberlakukan kebijakan politik yang sangat menentukan arah politik pada masa Orde Baru. Harmoko merupakan tokoh yang banyak menuai pro dan kontra. Untuk itu melalui analisis biografi ini penulis ingin melihat Harmoko dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan tulisan ilmiah yang objektif. Untuk itu penulis berusaha menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berjudul Kiprah Politik Harmoko pada Masa Orde Baru melalui Analisis Biografi (1983-1999) guna mengetahui dan mengemukakan peranan bagaimana Kiprah politik Harmoko pada masa Orde Baru. Adapun maksud dari pemakaian judul diatas adalah:

a. Kiprah Politik Harmoko

Harmoko merupakan tokoh pers dan politik di Indonesia. Pada penulisan skripsi ini, penulis mengkaji kiprah politik Harmoko sebagai tokoh pers yang memimpin Departemen Penerangan selama tiga periode dan menuangkan pemikiran, melakukan komunikasi politik dan memberlakukan kebijakan-kebijakan pada pers yang menentukan arah politik Indonesia. Selain itu penulis juga memaparkan peran Harmoko dalam perpolitikan yaitu saat Harmoko menjadi Ketua Umum Golkar yang

memberikan pemikiran, melakukan komunikasi politik dan menentukan kebijakan dalam memimpin Golkar yang menjadikan Golkar pemenang pemilu pada masa kepemimpinannya. Melalui kemenangan tersebut Golkar menjadi partai hegemoni yang sangat menentukan arah politik Indonesia pada saat itu. Kiprah politik Harmoko lainnya adalah saat Harmoko menjadi Ketua DPR/MPR yang menentukan kebijakan-kebijakan politik saat itu.

b. Analisis Biografi

Biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Analisis Biografi merupakan penyelidikan yang dilakukan oleh penulis terhadap biografi-biografi untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Penulis melakukan analisis biografi untuk membandingkan biografi-biografi yang telah ada dan mengkajinya serta membandingkan dengan sumber lain sehingga penulis dapat menemukan fakta untuk memaparkan tulisan ilmiah yang objektif. Seperti yang dipaparkan diatas Harmoko merupakan orang yang menuai pro-kontra sehingga buku atau biografi yang membahas Harmoko benar-benar harus dianalisis karena banyak mengandung subjektifitas. Oleh karena itu melalui karya tulis ilmiah ini penulis melakukan analisis terhadap biografi Harmoko untuk mengetahui kiprah politik Harmoko.

c. 1983-1999

Tahun 1983-1999 merupakan tahun yang dipakai penulis dalam periodisasi penulisan kajian mengenai *Kiprah Politik Harmoko pada masa Orde Baru melalui Analisis Biografi*. Tahun 1983 merupakan tahun awal Harmoko ikut serta dalam menentukan arah politik Indonesia yaitu melalui jabatannya di Departemen Penerangan sebagai Menteri Penerangan yang mengatur media untuk menjaga stabilitas Negara dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan terhadap pers. Dan tahun 1999 merupakan tahun terakhir Harmoko memimpin DPR/MPR. Penulis memilih menulis sampai tahun 1999 karena setelah Harmoko berhenti menjadi Ketua DPR/MPR kiprah politik Harmoko tidak terlalu terlihat diperpolitikan Indonesia. Bukan karena Harmoko berhenti dari perpolitikan Indonesia tapi karena keberadaan Harmoko dalam politik Indonesia sudah tidak dipercaya oleh

rakyat. Penulis memilih sampai tahun 1999 karena Harmoko masih berperan penting dalam menentukan kebijakan politik yang memberikan arah politik baru bagi Indonesia. Namun setelah tahun 1999 Harmoko tidak berperan penting dalam perpolitikan Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah secara umum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana “Bagaimana Kiprah Politik Harmoko pada Masa Orde Baru melalui Analisis Biografi (1983-1999) ?”, adapun pertanyaan penelitian dan rumusan masalah secara rinci adalah:

1. Bagaimana Latar Belakang kehidupan Harmoko ?
2. Bagaimana kebijakan Harmoko terhadap pers di Indonesia tahun 1983-1999 ?
3. Bagaimana peran Harmoko dalam politik di Indonesia tahun 1983-1999 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Latar Belakang Kehidupan Harmoko.
2. Mendeskripsikan kebijakan Harmoko terhadap Pers di Indonesia tahun 1983-1999.
3. Menganalisis peran Harmoko dalam politik di Indonesia tahun 1983-1999.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian secara khusus yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Menambah khazanah pengetahuan mengenai tokoh sejarah pada masa Orde Baru yaitu Harmoko dalam latar belakang kehidupannya.
2. Memberi pengetahuan keadaan politik pada masa orde baru dan kiprah politik Harmoko baik mengenai kebijakannya terhadap pers maupun pemikiran-pemikiran politiknya.

1.5 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam membahas “*Kiprah Politik Harmoko pada Masa Orde Baru melalui Analisis Biografi (1983-1999)*”.

1. Heuristik

Pengumpulan sumber yang digunakan penulis adalah dengan mengumpulkan sumber tertulis dalam hal ini buku dan data-data lainnya, selain itu sumber-sumber yang digunakan dalam tahapan Heuristik oleh penulis diantaranya:

a. Sumber Tertulis

Sumber tertulis yang dipergunakan penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini berupa buku, dokumen, artikel dan sumber tertulis lainnya yang relevan dari beberapa tempat. Pada tahap Heuristik ini, penulis mendatangi perpustakaan disekitar wilayah Bandung, diantaranya Perpustakaan UPI, Perpustakaan Batu Api, Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, Perpustakaan Kementrian, Perpustakaan CSIS, toko buku Gramedia, toko buku Palasari, toko buku Online di Buka Lapak serta mengunjungi website yang berhubungan dengan topik yang penulis kaji.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber yang dilakukan penulis dibedakan menjadi dua macam, yaitu kritik eksternal dan Internal, kritik sumber tersebut yaitu:

a. Kritik Eksternal

Penulis melakukan kritik eksternal terhadap sumber tertulis terhadap sumber yang didapatkan dalam tahap heuristik, penulis melakukan pemilihan terhadap buku-buku yang digunakan dengan melihat apakah sumber-sumber tersebut relevan dengan permasalahan yang dikaji penulis, apakah mencantumkan nama pengarang, tahun terbit, tempat serta penerbitnya serta apakah buku tersebut sudah dilakukan revisi atau belum. Begitu pula dengan artikel, jurnal, dokumen dan arsip yang penulis temukan. Dengan diketahuinya hal tersebut, maka sumber-sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber sejarah yang otentik dan integral.

b. Kritik Internal

Kritik internal digunakan penulis guna menguji kredibilitas (dapat dipercaya) dan reabilitas sumber-sumber yang diperoleh. Langkah yang dilakukan dalam kritik internal adalah dengan cara membandingkan antara sumber satu dengan sumber lain.

Kritik internal terhadap sumber tertulis dilakukan dengan melihat apakah isi buku atau sumber tertulis lainnya dapat memberikan informasi

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku. Setelah membaca seluruh sumber tertulis, penulis juga membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain apakah terdapat kesamaan atau perbedaan sehingga dapat dinilai informasi mana yang dapat dipercaya. Kritik sumber yang dilakukan penulis berupa pengkategorian apakah sumber yang didapat termasuk sumber primer ataupun sumber sekunder dan apakah informasi yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.

3. Interpretasi

Setelah melakukan pengumpulan sumber dan melakukan kritik terhadap sumber yang didapatkan, selanjutnya penulis akan melakukan interpretasi terhadap informasi dan sumber-sumber yang didapatkan. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan interdisipliner, sehingga penulis memerlukan ilmu-ilmu bantu lainnya dalam mengkaji pembahasan ini. Ilmu bantu yang penulis pakai ialah ilmu bantu psikologi, politik, dan komunikasi.

4. Historiografi

Setelah hasil interpretasi didapatkan, tahap akhir penulis lakukan adalah menuliskan hasil interpretasi tersebut dalam suatu karya ilmiah, tahap inilah yang disebut dengan Historiografi. Seluruh hasil penelitian berupa data dan fakta yang telah mengalami proses sebelumnya akan dituangkan dalam suatu bentuk tulisan. Dalam historiografi, penulis mencoba untuk menghubungkan keterkaitan antara fakta-fakta yang ada sehingga menjadi suatu penulisan sejarah dalam bentuk skripsi yang diberi judul "*Kiprah Politik Harmoko pada Masa Orde Baru melalui Analisis Biografi (1983-1999)*".

Dalam penulisan penelitian mengenai "*Kiprah Politik Harmoko pada Masa Orde Baru melalui Analisis Biografi (1983-1999)*". Teknik penulisannya akan menggunakan sistem Harvard. Penggunaan sistem ini digunakan oleh penulis karena disesuaikan dengan hal lazim yang digunakan Universitas Pendidikan Indonesia dalam kaidah penulisan karya ilmiah.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika dari penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan dipaparkan masalah dan alasan penulis mengkaji penelitian mengenai *Kiprah Politik Harmoko pada Masa Orde Baru melalui Analisis Biografi (1983-1999)*. Selain latar belakang dalam bab ini di dalamnya terdapat sub bab yakni rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka memaparkan mengenai buku-buku maupun sumber penelitian lainnya yang menjadi sumber utama penulis dalam melakukan penelitian mengenai *Kiprah Politik Harmoko pada Masa Orde Baru melalui Analisis Biografi (1983-1999)*, yang dapat berupa buku, jurnal, serta sumber internet yang dianggap relevan oleh penulis.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai metode atau proses yang akan dilaksanakan dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis serta studi literatur dan studi dokumentasi dalam melakukan heuristik. Proses penelitian disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI dan berdasarkan ejaan yang disempurnakan (EYD).

Bab IV *Kiprah Politik Harmoko pada Masa Orde Baru melalui Analisis Biografi (1983-1999)*, Bab ini akan memaparkan hasil penelitian dan pengolahan atau analisis data dan fakta yang ditemukan oleh penulis yang berkaitan dengan kajian penulis. Dalam Bab ini penulis akan memaparkan latar belakang kehidupan Harmoko, kiprah politik Harmoko pada masa Orde Baru, pemikiran politik Harmoko, serta komunikasi politik Harmoko.

Bab V Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan pembahasan terakhir dimana penulis memberikan suatu kesimpulan dari hasil interpretasi terhadap kajian penelitian. Interpretasi penulis ini disertai dengan analisis penulis dalam membuat kesimpulan atas jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam suatu rumusan masalah. Selain itu, dalam bab ini pula terdapat saran yang berguna untuk semua orang yang terkait dengan penelitian ini.

Daftar Pustaka, berisi rujukan yang penulis gunakan dalam menulis kajian mengenai "*Kiprah Politik Harmoko pada Masa Orde Baru melalui Analisis Biografi (1983-1999)*", sumber tersebut diantaranya buku, dokumen, sumber internet, dan lain-lain.